

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 sebagai sampel penelitian, dengan tujuan untuk memberikan bukti empiris tentang karakter eksekutif, *sales growth*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* studi kasus pada perusahaan industri manufaktur sektor industri *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan industri pengelolaan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan manufaktur identik dengan pabrik yang mengaplikasikan mesin-mesin, peralatan, teknik rekayasa dan tenaga kerja (sahamok.com, 2019).

Karakteristik utama industri adalah mengelola sumber daya menjadi barang jadi melalui proses pabrik. Aktivitas perusahaan yang tergolong dalam kelompok manufaktur memiliki tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan utama untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku;
2. Kegiatan pengelolaan dan pabrikasi atau perakitan atas bahan baku menjadi barang jadi;
3. Kegiatan menyimpan dan memasarkan barang jadi.

Industri manufaktur terdiri dari tiga sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan industri *consumer goods*. Sektor industri *consumer goods* terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu makanan dan minuman, rokok, kosmetik, farmasi dan keperluan rumah tangga, peralatan rumah tangga, dan lainnya (www.sahamok.com). Menurut Ahmad Syaifullah (2016) industri barang konsumsi merupakan industri yang memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Perkembangan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat yang tinggi. Perusahaan industri barang konsumsi memiliki kontribusi yang besar bagi penerimaan negara dari PPh, PPN,

dan pajak lainnya yang ditanggung perusahaan tersebut sehingga beban pajak perusahaan meningkat.

Selain untuk penerimaan Negara, sektor industri barang konsumsi adalah penyumbang kontribusi terbesar atas angka produk domestik bruto (PDB) yang dihasilkan oleh industri manufaktur secara keseluruhan. Dari keseluruhan PDB yang disumbangkan oleh industri manufaktur, kontribusi dari sektor industri barang konsumsi adalah sebesar 34,97% pada tahun 2013 dan sebesar 36,77% pada tahun 2014. Berikut tabel peran tiap cabang industri terhadap PDB Sektor Manufaktur tahun 2013-2014.

Tabel 1. 1 Peran Tiap Cabang Industri Terhadap PDB Sektor Manufaktur 2013-2014

Cabang Industri	2013		2014	
	(Rp triliun)	(%)	(Rp triliun)	(%)
Makanan, minuman dan tembakau	160.91	34.97	190.02	36.77
Tekstil, Brg. Kulit & alas kaki	43.09	9.36	47.01	9.1
Brg. Kayu & hasil hutan lainnya	23.19	5.04	26.35	5.1
Kertas dan barang cetakan	18.27	3.97	20.37	3.94
Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	56.1	12.19	60.58	11.72
Semen & Brg. Galian bukan logam	15.66	3.4	16.58	3.21
Logam dasar besi & baja	8.87	1.93	9.55	1.85
Alat Angk., Mesin, dan peralatannya	131.22	28.52	142.83	27.64
Barang lainnya	2.86	0.62	3.43	0.66
PDB Industri manufaktur	460.169	100	516.721	100

Sumber: Kemenperin (Laporan Kinerja Makro Ekonomi dan Sektor Industri 2014)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa peran sektor industri barang konsumsi adalah penyumbang kontribusi terbesar atas angka produk domestik bruto (PDB). Kontribusi dari sektor industri barang konsumsi adalah sebesar 34,97% pada tahun 2013 dan sebesar 36,77% pada tahun 2014.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara

langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (www.pajak.go.id). Bagi Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar. Hal itu terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kurang lebih 75% berasal dari sektor pajak, sedangkan sisanya berasal dari sumber lain, antara lain penerimaan bukan pajak dan hibah (Kemenkeu, 2019). Oleh karena itu, pajak menjadi fokus pemerintah untuk menjadi tumpuan terbesar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut tabel realisasi penerimaan negara dan kontribusi pajak terhadap penerimaan negara selama tahun 2013-2017.

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Negara (Triliun Rupiah) Tahun 2013-2017

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Realisasi Penerimaan Negara (Pajak, Non Pajak, dan Hibah)	Presentasi Penerimaan Pajak Pada Realisasi Penerimaan Negara
2013	Rp 1.193,0	Rp 1.529,7	78%
2014	Rp 1.280,4	Rp 1.667,1	77%
2015	Rp 1.380,0	Rp1.793,6	77%
2016	Rp 1.546,7	Rp 1.822,5	84%
2017	Rp 1.498,9	Rp 1.750,3	86%

Sumber: www.kemenkeu.go.id dan data yang diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa setiap tahun pajak memberikan pemasukan lebih dari 75% dalam APBN. Pada tahun 2013, penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.193,0 dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak, dan hibah) sebesar Rp 1.529,7 menghasilkan presentasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara sebesar 78%. Pada tahun 2014, penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.280,4 dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak, dan hibah) sebesar Rp 1.667,1 menghasilkan presentasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara sebesar 77%. Pada tahun 2015, penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.380,0 dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak, dan hibah) sebesar Rp1.793,6 menghasilkan presentasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara sebesar 77%. Pada tahun 2016, penerimaan perpajakan sebesar

Rp 1.546,7 dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak, dan hibah) sebesar Rp 1.822,5 menghasilkan presentasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara sebesar 84%. Dan pada tahun 2017, penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.498,9 dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak, dan hibah) sebesar Rp 1.750,3 menghasilkan presentasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan pajak sebesar 86%. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak.

Terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah, wajib pajak berusaha agar membayar pajak sekecil – kecilnya karena membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Dana untuk penyelenggaraan pemerintah sebagian berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang untuk melakukan *Tax Avoidance*.

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Pohan, 2016). Meski penghindaran pajak merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan yang bersifat legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, namun pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut untuk dilakukan.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut. Tujuan perusahaan sendiri yaitu untuk memaksimalkan kemakmuran para pemilik perusahaan (*shareholder*). Namun, dalam prakteknya tujuan tersebut sering tidak tercapai karena manajer memiliki tujuan sendiri yang bertentangan dengan tujuan atau kepemilikan saham (Horne dan Wachhowitez, 1997 dalam Pramitasari, 2016). Manajer sebagai agen yang dipilih oleh prinsipal seharusnya bertindak atas nama prinsipal untuk

mengingatkan kesejahteraan para pemegang saham, akan tetapi seringkali para agen bertindak untuk kepentingan sendiri demi keuntungan pribadi. Kondisi ini mengakibatkan ketidakselarasan antara kepentingan manajer dan pemegang saham yang disebut dengan konflik keagenan (*agency conflict*).

Selain masalah di atas, terdapat fenomena tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan sektor manufaktur yang terdapat di Indonesia. Salah satunya perusahaan makanan dan minuman yang terjadi pada beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT Coca Cola Indonesia. PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentan waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 556,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalkan pajak. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang (www.kompas.com).

Selain itu, kasus penghindaran pajak lainnya terjadi tahun 2016 pada IKEA Indonesia, IKEA diindikasikan menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar *euro* atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS. Hal tersebut dilakukan IKEA pada kurun waktu 2009 hingga 2014. IKEA dituduh memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda. Dengan demikian, mereka akan

terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Estimasi pajak yang dihindari IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7,5 juta *euro* hingga 10 juta *euro* (8,5 juta dollar AS hingga 11,2 juta dollar AS) (kompas.com, 2016).

Eksekutif adalah individu yang menempati sebuah posisi penting dalam sebuah posisi dalam sistem kepemimpinan dalam sebuah perusahaan dan atau suatu organisasi. Eksekutif dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memberikan pengaruh terhadap organisasi yang dipimpinnya sehingga memiliki pengaruh yang cukup besar kepada perusahaan serta pengaruh dalam pengambilan keputusan yang memiliki resiko.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Menurut Low (2006) menyebutkan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse* (Kartana, 2018). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Berbeda dengan *risk averse*, eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

Hasil penelitian Sefnia Lora Sihaholo (2015) menemukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*, mereka berpendapat bahwa karakter eksekutif digunakan ketika semakin esksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin besar tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Berbeda dengan hasil penelitian Nengsih (2018) yang berpendapat bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif yang menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan prinsip karakter eksekutif dapat mengurangi praktik *tax avoidance* atau dengan kata lain perusahaan menggunakan prinsip karakter eksekutif bukan sebagai kecenderungan untuk melakukan *tax avoidace* namun semata-mata untuk kehati-hatian dalam menghadapi resiko pada masa yang akan datang.

Sales growth merupakan aktivitas yang memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja, hal tersebut disebabkan karena perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan disebabkan dengan besarnya *sales growth*. *Sales growth* diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun (Keneddy dkk, 2013).

Hasil dari penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menemukan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Mereka berpendapat bahwa semakin tinggi *sales growth*, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar pula. Sedangkan penelitian yang dilakukan Permata dan Nurlaela, (2015) mendapatkan hasil penelitian bahwa *sales growth* tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance*. Mereka berpendapat bahwa *sales growth* yang baik di dalam suatu perusahaan akan membuat ukuran perusahaan semakin besar. Keadaan ini akan membuat perusahaan sulit dalam melakukan *tax saving* melalui *tax avoidance* perusahaan.

Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dan pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (Kurniasih & Sari, 2013).

Hasil penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian Nugraheni (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini disebabkan bahwa semakin besar proporsi pada nilai ukuran perusahaan tidak akan

mempengaruhi peningkatan dalam praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut namun dalam melaporkannya akan lebih akurat. Kondisi tersebut akan lebih memungkinkan perusahaan sulit untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, serta adanya perbedaan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk menguji lebih lanjut mengenai *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Karakter Eksekutif, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017).**

1.3 Perumusan Masalah

Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar namun bertolak belakang dengan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Karena pada sisi perusahaan pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan, sedangkan tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan upaya meminimalisasi pajak yang disebut juga *tax avoidance*.

Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Oleh karena itu masalah penghindaran pajak adalah masalah yang rumit dan unik. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka adapun pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakter eksekutif, *sales growth*, ukuran perusahaan dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017?
2. Bagaimana pengaruh karakter eksekutif, *sales growth*, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017?
 - b. *Sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017?
 - c. Ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka dapat diidentifikasi bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui karakter eksekutif, *sales growth*, ukuran perusahaan dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan karakter eksekutif, *sales growth*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial dari:

- a. Karakter Eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.
- b. *Sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.
- c. Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh karakter eksekutif, *sales growth*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.6.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang meliputi:

1. Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan perpajakan dan pertimbangan untuk membuat kebijakan-kebijakan perpajakan selanjutnya agar dapat memaksimalkan potensi pendapatan negara sektor pajak.

2. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memahami praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan.

3. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan *tax avoidance* yang benar dan efisiensi tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, agar dapat mengoptimalkan laba dan likuiditas perusahaan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan satu variabel terikat (variabel dependen) dan tiga variabel bebas (variabel independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Dalam hal ini variabel independen yang mungkin mempengaruhi *tax avoidance* antara lain adalah karakter eksekutif, *sales growth* dan ukuran perusahaan. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh baik secara simultan maupun parsial yang kemungkinan mempengaruhi *tax avoidance*.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods*. Data penelitian ini diambil dari laporan tahunan yang diperoleh peneliti dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan juga *website* resmi perusahaan tersebut.

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember sampai dengan Mei 2019. Periode penelitian ini menggunakan laporan tahunan perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pada sistematika penulisan, penulis menjelaskan secara ringkas mengenai bab demi bab, yang terdiri dari lima bab untuk membantu penulis mempermudah pembahasan dan mengarahkan pemikiran penullis pada kerangka acuan yang telah ditentukan dengan sistematis. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang literatur mengenai landasan teori-teori tentang pajak, penghindaran pajak dan variabel penelitian yaitu karakter eksekutif, *sales growth*, dan ukuran perusahaan dalam kaitannya dengan fenomena penghindaran pajak. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, identifikasi variabel, menjelaskan tahapan penelitian, populasi dan sampel, menguraikan pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data yang mendasari hasil penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisis dari penelitian yang dilakukan, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (karakter eksekutif, *sales growth* dan ukuran perusahaan) terhadap variabel dependen (*tax avoidance*).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan atas hasil penelitian serta saran-saran terkait dengan penelitian ini sehingga diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.